

PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK  
MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UKM

SKRIPSI



Diajukan oleh :  
Himawan Saputro  
0813010019/FE/EA

Kepada

FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
2012

# SKRIPSI

## PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM

Yang diajukan

Himawan Saputro  
0813010019/FE/EA

Disetujui untuk Ujian Lisan oleh

Pembimbing Utama

DR. INDRAWATI YUHERTIANA, MM, AK  
NIP.196610171993032001

Tanggal : 19 Juli 2012

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi

DRS. EC. R.A. SUWAIDI, MS  
NIP.19600330198603100

## USULAN PENELITIAN

### PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM

Yang diajukan

Himawan Saputro  
0813010019/FE/EA

telah disetujui untuk diseminarkan oleh

Pembimbing Utama

DR. INDRAWATI YUHERTIANA, MM, AK

Tanggal : 19 Juli 2012

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

DR. SRI TRISNANINGSIH, SE, MSI  
NIP.1965092919922032001

SKRIPSI  
PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI  
PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM.

Disusun Oleh :  
Himawan Saputro

0813010019/FE/AK

telah dipertahankan dihadapan  
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
pada tanggal 31 Juli 2012

Pembimbing :

Tim Penguji :

Pembimbing Utama

Ketua

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, AK

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, AK  
Sekretaris

Drs. Gideon, MSi

Anggota

Drs. Ec. Munari, MM

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, SE, MM  
NIP. 19630924 198903 1001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM” .

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih atas segala bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis guna mendukung penyelesaian skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Dany Ichsanudin, MSi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, SE, Msi, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu DR. Indrawati Yuhertiana, MM, AK., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan telah meluangkan waktu serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan koreksi yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap tenaga pengajar, karyawan dan seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Keluargaku yang tercinta terutama Almarhum Bapak yang senantiasa memberikan semangat yang luar biasa, walau tanpa kehadiran beliau disisi saya. Ibu yang dengan sabar membimbing dan menyemangati saya, kemudian doa restu dan tanpa lelah memberikan dukungan moril maupun materiil dalam menyelesaikan kuliah hingga akhir penyusunan skripsi.
7. Sahabatku yang tercinta, The Big Family, Mandu, Drajat, Dila, Ifah. Yuni, Resha dan terutama Dinda Kumala Sari yg membantu saya dalam menyusun skripsi ini, Desy, Gatra, bos saya pak Priyo Prastowo yang senantiasa memberikan bantuan, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah hingga akhir penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan anak didik bu Indra, Ayu, Puspita, Retno, Nizar (Icang), Yudo, Hermawan (Boni).
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2008.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak tersebut di atas. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulis menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk membantu kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi referensi pendidikan kita semua.

Surabaya, Juli 2012,

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAKSI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori .....	14
2.2.1 Dasar-Dasar perpajakan .....	14
2.2.2 Pengertian Pajak .....	14
2.2.1.2 Fungsi-Fungsi Pajak .....	17
2.2.3.1 Pengertian Sistem .....	17



2.2.3.2	Pengertian Informasi .....	17
2.2.3.3	Pengertian Sistem Informasi Akuntansi .....	18
2.2.3.4	Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi .....	19
2.2.3.5	Tujuan Informasi Akuntansi .....	20
2.2.3.6	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi .....	21
2.2.4	Penggunaan Komputer dalam Sistem Informasi Akuntansi .....	22
2.2.5	Kinerja Sistem Informasi Akuntansi .....	27
2.2.5.1	Kepuasan Pemakai Sistem Informasi Akuntansi .....	27
2.2.5.2	Pemakai Sistem .....	28
2.2.5.3	Kualitas Sistem Informasi .....	39
2.2.6	Software BDS-IBS .....	30
2.3	Kerangka Pikir .....	31
2.3.1	Pengaruh Partisipasi Pemakai berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi .....	31
2.3.2	Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi .....	32
2.3.3	Pengaruh Program Pelatihan dan Pendidikan Pemakai berpengaruh terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi .....	34

2.4 Hipotesis .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	36
3.1.1 Definisi Operasional .....	36
3.1.2 Pengukuran Variabel .....	38
3.2 Teknik Penentuan Sampel .....	39
3.2.1 Obyek Penelitian .....	39
3.2.2 Populasi .....	40
3.2.3 Sampel .....	40
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.3.1 Jenis Data .....	41
3.3.2 Sumber Data .....	41
3.3.3 Pengumpulan Data .....	41
3.4 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	42
3.4.1 Uji Validitas .....	42
3.4.2 Uji Reliabilitas .....	43
3.4.3 Uji Normalitas .....	43
3.4.4 Uji Asumsi Klasik .....	44
3.4.4.1 Autokorelasi .....	44

3.4.4.2	Multikolerasi .....	45
3.4.4.3	Heteroskedastisitas .....	45
3.4.5	Teknik Analisis .....	46
3.4.6	Uji Hipotesis .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1	Deskripsi Objek Penelitian .....	43
4.1.1	Deskripsi Wajib pajak. ....	46
4.1.2	Deskripsi Persekutuan Komanditer .....	47
4.1.3	Deskripsi Perusahaan Perorangan .....	48
4.2	Deskripsi Pengumpulan Sampel .....	49
4.2.1	Deskripsi Jawaban Responden .....	51
4.2.2.1	Deskripsi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Wajib Pajak .....	51
4.2.2.2	Deskripsi Jawaban Responden Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak.....	53
4.2.2.3	Deskripsi Jawaban Responden Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....	55
4.3	Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	58
4.3.1.1	Uji Validitas .....	58

4.3.1.2	Uji Validitas Pada Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1).....	58
4.3.1.3	Uji Validitas Pada Variabel Persepsi Wajib Pajak (X2) .....	59
4.3.1.4	Uji Validitas Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	60
4.3.2	Uji Reliabilitas .....	60
4.3.3	Uji Normalitas .....	61
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	63
4.4.1	Multikorelasi .....	63
4.4.2	Autokorelasi .....	64
4.4.3	Heterokedastisitas .....	64
4.5	Analisis Regresi Linier Berganda .....	66
4.6	Pengujian Hipotesis .....	68
4.6.1	Uji F (Uji Serentak) .....	68
4.6.2	Uji T (Uji Parsial) .....	70
4.6	Pembahasan Hasil Penelitian .....	72
4.6.1	Implikasi Penelitian .....	72
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	73
5.1	Kesimpulan .....	73
5.2	Saran .....	74

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah UKM kota Surabaya tahun 2010-2011 .....	14
Tabel 4.1	Karakteristik Responden (Jenis Kelamin) .....	49
Tabel 4.2	Karakteristik Responden (Jabatan) .....	50
Tabel 4.3	Karakteristik Responden (Umur) .....	50
Tabel 4.	Karakteristik Responden (Pendidikan Terakhir) .....	50
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi pada variabel pemahaman wajib pajak (X1) .....	51
Tabel 4.5	Distribusi frekuensi pada variabel Persepsi wajib pajak (X2) .....	53
Tabel 4.6	Distribusi frekuensi pada variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) .....	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Validitaas Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) .....	58
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak (X2) .....	59
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitaas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	60
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas .....	61
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas .....	61
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas .....	63
Tabel 4.13	Hasil Uji Heterokedastisitas .....	65

Tabel 4.14 Analisis Regresi .....	68
Tabel 4.15 Pengujian secara simultan .....	69
Tabel 4.16 Koefisien Determinasi .....	70
Tabel 4.17 Uji T .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan kerangka pikir .....	32
----------	----------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Lampiran 3	Uji Validitas dan Reliabilitaas
Lampiran 4	Regresi dan Uji Asumsi Klasik



PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB  
PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK PADA UKM

Oleh :  
HIMAWAN SAPUTRO

Abstraksi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang relative besar. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak.

Populasi dari penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian wilayah Surabaya yaitu sebanyak 74. Sedangkan sampel penelitian yang diambil adalah Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas di Surabaya wilayah Selatan dan masih aktif beroperasi terhitung sampai tanggal 1 Juli 2012 yaitu sebanyak 28 unit usaha

**Keywords** : pemahaman wajib pajak, persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak, kepatuhan wajib pajak UKM.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktekkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Pada masa itu rakyat diwajibkan untuk menyerahkan upeti kepada raja yang besarnya sudah ditentukan. Pemungutan pajak atau upeti ini terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Bahkan setelah Indonesia merdeka pajak ditetapkan dan dipungut setiap tahun oleh pemerintah yang berkuasa.

Pada tahun 1980-an harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia mengalami kemerosotan dan situasi tidak menentu. Padahal struktur keuangan Indonesia banyak mengandalkan pemasukan/penerimaan dari sektor ini. Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah mencari alternatif pengganti pemasukan negara dan pilihan tersebut maka pemerintah mencari alternatif pengganti pemasukan negara dan pilihan tersebut jatuh pada pajak. Kemudian disadari pula bahwa pranata hukum di sektor pajak banyak dibangun berdasarkan produk hukum peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang penyusunannya dilatarbelakangi oleh motif, dasar filosofi, konsep bernegara, dan struktur organisasi yang berbeda dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah dengan

melakukan langkah-langkah perombakan ketentuan perpajakan secara besar-besaran yang kemudian dikenal dengan tax reform

Dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana yang relatif besar. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri (Agusti dan Herawaty, 2009). Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yang menghimpun penerimaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Pajak dikenakan kepada semua badan usaha termasuk UKM ( Usaha Kecil dan Menengah). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor UKM telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, sementara itu kemajuan yang dicapai dalam restrukturisasi di sektor keuangan khususnya industri perbankan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan dengan tingkat pertumbuhan porsi yang lebih besar untuk UKM, perkembangan inilah yang menjadi pendorong bagi peningkatan pertumbuhan dan peran sektor UKM dalam perekonomian nasional.

Momentum ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Perkembangan sektor UKM tersebut selain berimbas pada pertumbuhan perekonomian sektor riil juga menjadi potensi bagi perkembangan penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Hal ini menarik perhatian Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak, oleh karena itu Direktorat Jendral Pajak mulai mengarahkan bidikan penerimaan pajak ke sektor pelaku usaha kecil, dan menengah (UKM). Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut cukup beralasan karena jumlah pelaku usaha UKM itu cukup banyak terutama di wilayah Kota Surabaya, sehingga cukup potensial untuk memperoleh penerimaan pajak dari sektor tersebut. Menurut sebuah berita di [Indopos.com](http://Indopos.com), Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, jumlah UKM tahun lalu sekitar 54 juta unit, tapi Ditjen Pajak mencatat baru lima persen sumbangan UKM ke penerimaan pajak. Fuad mengungkapkan, penghasilan UKM mencapai miliaran rupiah, seperti terlihat di toko-toko kawasan Glodok atau Mangga Dua, hanya saja mereka banyak yang belum menunaikan kewajibannya.

Pelaku UKM yang dimaksud adalah pelaku UKM yang telah memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak atau dapat pula dinyatakan sebagai wajib

pajak berbentuk orang pribadi ataupun wajib pajak berbentuk badan usaha, dimana pada dasarnya UKM dewasa ini telah menjadi target utama yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam hal penerimaan pajak.

Menurut hasil survey Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya, pada tahun 2011 Usaha Kecil Menengah yang tumbuh di Surabaya dan yang resmi terdaftar adalah 467 unit. Dengan perincian jumlah usaha kecil 320 unit dan usaha menengah sebanyak 147 unit. Jumlah ini menurun jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 369 unit usaha. Menurut survey di berbagai kecamatan, kecamatan Tambaksari memiliki paling banyak Usaha Kecil Menengah yakni 49 unit diikuti dengan kecamatan Asemrowo sebanyak 43 unit.

Usaha Kecil Menengah dengan jumlah terbesar yang beroperasi di Surabaya adalah Usaha Kecil Menengah Agro dengan jumlah 78 unit, sedangkan Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas sendiri merupakan jenis usaha terbanyak kedua di Surabaya dengan jumlah 74 unit.

Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas dari tahun ke tahun peningkatannya fluktuatif atau naik turun. Menurut data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya, pada tahun 2005 usaha Pulp dan Kertas di Surabaya tumbuh subur dengan jumlah Usaha Kecil Menengah yang beroperasi sebanyak 103 unit. Namun pada tiga tahun selanjutnya jumlah

tersebut terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2008 jumlah Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas yang beroperasi hanya sejumlah 21 unit saja. Tahun 2009, Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas di Surabaya mulai bangkit lagi dengan jumlah usaha yang beroperasi sebanyak 77 unit. Sedangkan tahun selanjutnya yaitu tahun 2010 mengalami sedikit penurunan lagi sebanyak 8 unit yang menjadikan jumlah Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas pada tahun 2010 menjadi sebanyak 69 unit. Pada tahun 2011 terdapat penambahan Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas sebanyak 5 unit, sehingga jumlah terakhir menjadi 74 unit. Penyebaran Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas ini cukup merata di semua wilayah Surabaya. Wilayah Surabaya selatan sendiri mempunyai jumlah Usaha Kecil Menengah Pulp dan Kertas sebanyak 28 unit atau sebesar 27% dari total 74 unit yang tersebar di seluruh Surabaya. Jumlah 28 unit usaha tersebut terdiri dari 11 usaha perorangan dan 17 usaha persekutuan komanditer

Tabel 1:Jumlah UKM Kota Surabaya Tahun 2010-2011

KELOMPOK	KECIL		MENENGAH		TOTAL	
INDUSTRI	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Kimia	32	41	34	30	66	71
Agro	58	43	20	15	78	58
Pulp & kertas	42	61	13	13	55	74
Hasil Hutan	4	17	9	12	13	29
Alat Angkut	8	6	14	6	22	12
Logam, mesin dan rekayasa	12	14	25	23	37	37
Tekstil	30	31	5	12	35	33
Elektronika & aneka	36	120	23	41	59	161
<b>Jumlah</b>	222	333	157	152	365	475

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak, serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak masih rendah ( Gardina dan Haryanto 2006 ). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari pelatihan pajak. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi masih belum tersosialisasi pajak secara menyeluruh , kecuali mereka



yang menempuh jurusan perpajakan. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak juga masih mempersiapkan pajak itu sebagai pungutan wajib pajak sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak khususnya pada industri UKM

Beberapa UKM ternyata masih banyak yang belum memahami akan pajak, mereka cenderung memiliki perspektif negatif terhadap instansi pajak, menyusul minimnya pemahaman pelaku khususnya dalam penetapan tarif pajak. Selain itu, tidak sedikit pelaku UKM yang mengeluhkan tindakan Direktorat Jendral Pajak dalam menagih kewajiban perpajakan dari aktivitas usahanya dengan besaran tarif pembayarannya yang dinilai tidak transparan. Hal tersebut terjadi karena selama ini UKM selalu merasa dikejar-kejar pajak, tetapi tidak mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, serta belum adanya

sosialisasi yang langsung menyentuh segmen ini, sehingga mereka cenderung memiliki perspektif negatif terhadap instansi pajak.

Menurut salah seorang konsultan pajak yang menangani perpajakan UKM di Surabaya yang bernama Priyo Prastowo, mengatakan bahwa wajib pajak tersebut kurang paham terhadap pajak, mereka enggan patuh dikarenakan mereka berpersepsi bahwa petugas pajak menakutkan, selain itu mereka merasa bahwa pelaporan dan perhitungan pajak sangat rumit. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya kantor pajak.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UKM”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah pemahaman wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM dalam membayar pajak ?.”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan :

1. Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak pada UKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian antara lain :

#### 1. Manfaat Peneliti

Memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi, serta memberikan bahan pertimbangan guna mengambil langkah kebijaksanaan selanjutnya untuk mencapai tujuan. Dan memberikan tambahan informasi untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan di Indonesia.

#### 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas masalah ini kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada umumnya dan fakultas ekonomi.

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan ilmu akuntansi terutama pada aspek perilaku wajib pajak UKM dalam membayar pajak.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi atau masukan sejauh mana kewajiban perpajakan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku